

## DAFTAR REFERENSI

- Effendy. 2013. Tinjauan Hubungan Opini WTP BPK dengan Kasus Korupsi pada Pemda di Indonesia Kajian Manajemen Keuangan Pemerintah, Hubungan antara Masyarakat, Pemerintah dan Pemeriksa (Auditor). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol.13(1)*.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. *Agency Theory: An Assesment and Review. The Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 1, Hal 57-74.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hardjapamekas, Erry R. 2008. *Melawan Korupsi Tugas Kita Semua*.  
<http://www.fokal.info/fokal/arsip/arsip-hukum/365.html>.
- Heriningsih, Sucahyo, dan Marita. 2013. Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). *Buletin Ekonomi, Vol 11, No.1*. FE UPN Veteran Yogyakarta.
- Heriningsih, Sucahyo, dan Ruserlistyani. 2014. Pengungkapan Laporan Keuangan, Kelemahan SPI, dan Ketaatan pada Perundang-undangan yang Dianalisis dari opini Auditor. *Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper Sinau 3*, UPN Veteran Yogyakarta.

Husna, Rahayu, dan Triyanto. 2017. Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *E-Proceeding of Management : Vol.4, No.2* Agustus 2017:1637.

Indonesia Corruption Watch. 2000. *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Indra, B. dan Gatot S. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik- Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

Ismunawan. 2016. Pengaruh Faktor non Keuangan dan Keuangan terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Tesis: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret*.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2011. *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.

Komisi Pemberantas Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi; Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi.

Liu, J. and Lin, B. 2012. Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research, Vol. 5*, pp. 163186.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andy Offset.

Masyitoh, Wardhani, dan Setyaningrum. 2015. Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Simposium Nasional Akuntansi 18* Medan.

Rini dan Damiami. 2017. Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 4(1)*, 2017, pp 73-90.

Saleh dan Ratmono. 2017. Analisis Pengaruh Korupsi terhadap Audit Pemerintahan pada Instansi Pemerintah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting Vol.6(1)*, pp1-13.

Sekaran, U. 2006. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach 4th*. Jakarta : Salemba Empat.

Subekti dan Tjitrosoedibio. 1973. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi.

